

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 02/NKB/2008
02/NKB/DPRD/2008**

TANGGAL : 29 Januari 2008

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 02/NKB/2008
 : 02/NKB/DPRD/2008

TANGGAL : 29 Januari 2008

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **HERRY ZUDIANTO**
Jabatan : **Walikota Yogyakarta**

Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta

bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006, tertanggal 11 Desember 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- 2.a. Nama : ARIF NOOR HARTANTO
 Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : ANDRIE SUBIANTORO
 Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DWI BUDI UTOMO
 Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202 Tahun 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2004 – 2009 untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Nomor $\frac{19/NKB/2007}{06/NKB/DPRD/2007}$ tanggal 1 Desember 2007 telah dicabut dan diganti

dengan Nomor $\frac{01/NKB/2008}{01/NKB/DPRD/2008}$ tanggal 29 Januari 2008, maka Prioritas dan

Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

$\frac{20/NKB/2007}{07/NKB/DPRD/2007}$ tanggal 3 Desember 2007 perlu dicabut dan diganti untuk

disesuaikan. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2008 dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sepakat terhadap prioritas program dan plafon anggaran APBD untuk mencapai sasaran program tahun 2008 sehingga menjadi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran APBD TA 2008 Kota Yogyakarta ini kondisi umum dilihat dari aspek-aspek yang terukur meliputi perekonomian daerah, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan.

Kondisi umum perekonomian daerah dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan laju inflasi. Pada indikator pertumbuhan ekonomi¹, tahun 2006 perekonomian Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 3,96%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya pertumbuhan pada sektor bangunan sebesar 17,57%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,71%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,63%, dan sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 4,67%. Tetapi di sisi lain, pada tahun 2006 juga terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 3,74% serta sektor pertanian sebesar 2,35%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diperkirakan mengalami kenaikan. Pertumbuhan tersebut didasarkan pada tumbuhnya pariwisata pasca gempa menyebabkan tumbuhnya sektor jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan baik milik masyarakat, pemerintah, sarana prasarana umum, diperkirakan akan menaikkan tumbuhnya sektor bangunan.

Perkembangan PDRB² per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2005 dan 2006 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 PDRB perkapita Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 10.109.233,- sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp 10.322.561,- atau mengalami kenaikan sebesar 2,11%.

Laju inflasi³ pada tahun 2005 sebesar 14,98%, yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006 laju inflasi sebesar 10,40% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Besarnya angka inflasi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya harga-harga bangunan dan upah tenaga kerja di sektor bangunan.

¹ Sumber : BPS Kota Yogyakarta

² Sumber : BPS Kota Yogyakarta

³ Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Penduduk⁴ berumur 15 tahun ke atas di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 tercatat 359.201 orang, terdiri dari 175.815 laki-laki dan 183.386 perempuan. Dari jumlah tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama yaitu bekerja, mencari kerja, sekolah dan lainnya.

Pengangguran sampai dengan tahun 2006 tercatat sebanyak 34.441 orang. Pertumbuhan ekonomi kota yang mulai pulih pasca gempa bumi dalam berbagai sektor usaha berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah pengangguran. Pada akhir tahun 2007 diprediksikan turun sebesar 3,62% dibandingkan tahun 2006 atau menjadi 33.194 orang.

Pada sektor kesehatan⁵ perilaku hidup sehat merupakan indikator penting yang berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat, belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu indikator perilaku hidup sehat ditunjukkan oleh budaya bersih yang dilihat dari angka bebas jentik minimal 95%, tetapi pada tahun 2006 hasil yang dicapai baru 77,9% dan di akhir tahun 2007 di prediksikan menjadi 85%. Di sisi lain, angka kematian bayi menurun sangat tajam yaitu pada tahun 2006 sebesar 7,62 per 1000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2007 diprediksikan menjadi 3,7 % per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2006 Angka Kematian Ibu melahirkan 61,7 per 100.000 per kelahiran hidup, umur harapan hidup laki-laki sebesar 66,38 tahun, umur harapan hidup perempuan sebesar 70,25 tahun, pada tahun 2007 angka kematian ibu melahirkan dan umur harapan hidup diprediksikan sama.

1.2. Permasalahan dan Tantangan Utama yang Dihadapi

Berbagai pencapaian di tahun 2006 dan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2007, maka masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
Kepariwisataan pada tahun 2006 menurun jika dibandingkan tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya bencana alam gempa bumi dan belum optimalnya pengembangan pariwisata

⁴ Sumber : BPS Kota Yogyakarta

⁵ Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

berbasis budaya. Dengan berbagai capaian pelaksanaan penanganan pasca gempa tahun 2006 disertai perkiraan target jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal (*length of stay*) tahun 2007, masalah utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tahun 2008 adalah :

- a. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat
- c. Masih kurangnya promosi pariwisata yang tepat sasaran dan kurangnya koordinasi dalam berpromosi dengan pemangku kepentingan khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota serta pelaku pariwisata.
- d. Masih kurangnya pengembangan seni yang dapat mendukung pariwisata
- e. Pertunjukan seni dan budaya yang belum optimal sehingga belum menjadi daya tarik wisatawan
- f. Belum optimalnya pembangunan jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kepariwisataan
- g. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata, antara lain :
 - bercampurnya berbagai moda angkutan dalam satu jalur sehingga tidak tertibnya arus lalu lintas
 - masih adanya gelandangan, pengemis dan anak jalan yang berada di obyek wisata dan tempat strategis lainnya
 - belum seluruh tempat wisata dilengkapi dengan prasarana kebersihan
 - beberapa tarif angkutan penumpang yang tidak seragam dan pasti
 - di beberapa kawasan program penghijauan dan penerangan jalan umum dalam mewujudkan *city beautification* di malam hari belum dapat ditangani secara optimal

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. Menyusun strategi promosi sesuai segmentasi pasar wisatawan.

- b. Melakukan promosi untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi.
- c. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya
- d. Menciptakan diversifikasi produk wisata.
- e. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- f. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengembalikan kapasitas usahanya.
- g. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona.
- h. Menyusun *calender of event* seni dan budaya secara periodik.
- i. Membangun jaringan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
- j. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Pendidikan Berkualitas

Permasalahan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit, dengan demikian permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan menurut kelompok faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. Mutu produk/lulusan
 - masih adanya angka putus sekolah
- b. Mutu proses pembelajaran
 - belum optimalnya pembelajaran masyarakat
- c. Mutu layanan sekolah
 - belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi
 - belum semua guru memiliki sertifikat profesi
 - kesenjangan mutu antar sekolah
- d. Mutu lingkungan sekolah
 - belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas
 - belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif

Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. Mutu produk/lulusan
 - meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan
 - b. Mutu proses pembelajaran
 - menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat.
 - meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ, EQ, dan SQ
 - c. Mutu layanan sekolah
 - meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling
 - pemerataan akses pendidikan
 - meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi
 - akreditasi sekolah
 - d. Mutu lingkungan sekolah
 - menciptakan suasana pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan
 - meningkatkan sarana prasarana sekolah
3. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
- Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005, mengakibatkan belum optimalnya investasi dan daya saing produk. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2007 karena dampak dari bencana alam gempa bumi.

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah Kota Yogyakarta disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara normal pasca bencana alam gempa bumi, yaitu beberapa pasar masih perlu pembenahan seperti pasar Beringharjo lantai III, pasar Giwangan, pasar Serangan dan pasar Tunjungsari. masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta

- b. masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah
- c. belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif
- d. belum optimalnya dukungan bank/lembaga keuangan pada sektor riil dan UMKMK
- e. masih rendahnya akses permodalan bagi UMKMK

Belum optimalnya pertumbuhan pendapatan daerah Kota Yogyakarta disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. belum tersedianya *database* potensi pendapatan daerah yang memadai
- b. belum mantapnya sistem manajemen pemungutan pajak dan retribusi
- c. belum semua aset daerah dimanfaatkan secara optimal
- d. tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi masih relatif rendah

Kondisi perekonomian⁶ yang menurun tersebut juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga belum sepenuhnya potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Pada Tahun Anggaran 2006 pendapatan asli daerah sebesar Rp 96.419.456.304,52,- sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 104.162.882.000,-. Pendapatan tersebut masih dimungkinkan untuk ditingkatkan, sehingga akan semakin mendekati potensi yang dimiliki. Selain mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah juga dapat ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada masyarakat/swasta untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dengan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. mengembangkan perdagangan dan industri, khususnya sektor UMKMK

⁶ Sumber : BPKD Kota Yogyakarta

- b. merumuskan regulasi dan perijinan yang dapat mendorong masyarakat/swasta dalam meningkatkan perekonomian
- c. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah
- d. mengembangkan etika bisnis bagi pengusaha UMKMK
- e. menjalin kemitraan dengan dunia usaha

4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya teratasi sebagai akibat krisis ekonomi, khususnya pada sektor riil. Kondisi tersebut lebih diperburuk dengan kenaikan harga 9 bahan pokok khususnya pertengahan tahun 2007. Kenaikan tersebut mengakibatkan biaya produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan tingginya angka kemiskinan. Permasalahan lain yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. kerugian yang disebabkan oleh bencana gempa bumi terutama ditanggung oleh sektor swasta, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan penambahan kesempatan kerja.
- b. belum optimalnya investasi asing dan dalam negeri yang masuk di Kota Yogyakarta, sehingga pengangguran belum dapat terserap
- c. belum pulihnya sektor riil, sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.
- d. kenaikan harga-harga bahan produksi juga mengakibatkan kenaikan biaya produksi, untuk tetap dapat mempertahankan harga jual produk yang tetap kompetitif salah satu upaya adalah mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang tersedia.
- e. kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kebutuhannya, mengakibatkan tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sehingga taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.
- f. besarnya jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.

Dengan kondisi dan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin
- b. menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik calon investor
- c. mengendalikan kenaikan harga 9 kebutuhan pokok dengan operasi pasar
- d. meningkatkan kesempatan kerja, produktifitas pekerja, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
- e. mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat
- f. meningkatkan akses permodalan, khususnya sektor riil

5. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan

Kondisi derajat kesehatan masyarakat yang hanya dilihat dari indikator angka kematian bayi , angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, ternyata masih terdapat permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya yaitu :

- a. persentase balita dengan status gizi buruk ada kecenderungan meningkat
- b. kenaikan angka kematian bayi
- c. kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah
- d. ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi
- e. partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah
- f. belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
- g. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan

Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan balita

- b. peningkatan, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan
 - c. peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
 - d. permasyarakatan budaya perilaku hidup sehat
6. Belum Optimalnya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Mewujudkan *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih)
- Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dilaksanakan secara intensif namun hasilnya masih belum optimal. Adapun permasalahan–permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :
- a. adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang
 - b. belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat
 - c. masih rendahnya komitmen aparaturnya dalam penegakan hukum
 - d. masih rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. penegakan hukum dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
 - b. optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan *clean government*
 - c. melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai
7. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)
- Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, kendati demikian hasilnya masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi disebabkan adanya permasalahan–permasalahan sebagai berikut :
- a. belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparaturnya

- b. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal
- c. belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. pembenahan manajemen kepegawaian
- c. penerapan pemberian penghargaan dan hukuman serta pembinaan pegawai

8. Menurunnya Kualitas Sarana Prasarana

Pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006 lalu berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana belum terselesainya pembangunan kembali sarana prasarana tersebut masih merupakan permasalahan. Sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. kerusakan sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih, sanitasi perkotaan, permukiman dan perumahan, jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali
- b. masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
- c. belum tertatanya sistem transportasi yang baik

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan
- c. meningkatkan sistem transportasi perkotaan

9. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Permasalahan lingkungan hidup yang masih dihadapi adalah :

- a. meningkatnya polusi udara
- b. belum optimalnya pengelolaan sampah
- c. belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat
- d. kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana perkotaan

10. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam

Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat, sehingga dalam tahun 2007 ini masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. berbagai upaya penanganan bencana alam belum dapat menuntaskan dampak dari bencana alam
- b. belum terumuskannya mitigasi bencana secara jelas

Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penuntasan dampak bencana terhadap sarana dan prasarana perkotaan
- b. mengembangkan manajemen bencana berbasis masyarakat sehingga mampu meminimalkan dampak bencana

Berdasarkan masalah dan tantangan tersebut maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Tujuan rencana aksi daerah pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu :

- a. meningkatkan peran pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya yang berbasis pada budaya lokal;
- c. meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara;
- d. meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional;
- e. berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi;
- f. meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja;
- b. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Pariwisata dengan sasaran yaitu meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan sebanyak 356.958 orang dari 1.072.168 orang menjadi 1.429.126 orang atau naik 33,29%,

sedangkan lama tinggal naik 0,38 hari dari 2 hari menjadi 2,38 hari atau naik 19%

- b. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya dengan sasaran yaitu meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik dari 135 menjadi 158 kekayaan budaya
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%
- d. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa dengan sasaran yaitu meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- e. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dengan sasaran yaitu meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.300 titik menjadi 17.700 titik
- f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.515.726.100,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

2. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Tujuan rencana aksi daerah meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :

- a. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
- b. meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tingkat Rukun Warga (RW);
- c. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru;

- d. mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual;
- e. memperluas jangkauan dalam pembelajaran masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
- b. mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual;
- c. memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana dengan sasaran yaitu meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 18% menjadi 33%, meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 76% menjadi 82%, meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 76% menjadi 82% dan meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 56% menjadi 62%
- b. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dari 89% menjadi 92%
- c. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan dengan sasaran yaitu diperolehnya baku mutu diatas rata-rata 2% menjadi 4%

- d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%
- e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran yaitu berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda dengan sasaran yaitu meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4%
- g. Program Fasilitasi Olah Raga dengan sasaran yaitu meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dialokasikan anggaran sebesar Rp 49.695.576.147,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Tujuan rencana aksi daerah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yaitu :

- a. mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha;
- c. menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau;
- e. meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian;
- f. meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- g. mengurangi jumlah pelanggaran serta meningkatkan PAD;
- h. memfasilitasi kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan jasa;
- i. menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;
- j. meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;

- k. meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- b. mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi;
- c. mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dengan sasaran yaitu kesesuaian dengan standar perijinan dari 76% menjadi 82% dan ketersediaan regulasi perijinan dari 48% menjadi 56%
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK dengan sasaran yaitu meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar
- c. Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan sasaran yaitu penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63% menjadi 66%
- d. Program Peningkatan Perdagangan dengan sasaran yaitu meningkatnya nilai barang yang dijual dari 69% menjadi 73%
- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan dengan sasaran yaitu peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelompok menjadi 111 kelompok, terdiri: kelas utama yaitu dari 2 kelompok menjadi 3 kelompok, kelas madya dari 10 kelompok menjadi 14 kelompok, kelas lanjut tetap 27 kelompok, kelas pemula dari 70 kelompok menjadi 67 kelompok
- f. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar dengan sasaran yaitu kualitas pengelolaan pasar, meliputi ketertiban 82% menjadi 84%, keamanan 87% menjadi 89% dan kebersihan >30' menjadi <30'

- g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dengan sasaran yaitu menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%
- h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%
- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%
- j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74% menjadi 78%
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut melalui Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 10% dan meningkatnya bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik 2,5%

Dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah serta dukungan dari masyarakat, maka pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,26% dan tingkat inflasi diperkirakan 9,44%, sehingga Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat 14,68%.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.028.920.500,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta

- 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Tujuan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yaitu :
 - a. memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran;
 - b. mengurangi jumlah penduduk miskin;

- c. mengurangi tingkat pengangguran;
- d. meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
- f. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun bagi penduduk miskin;
- g. mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas;
- h. menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan difabel;
- b. menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat guncangan ekonomi dan sosial;
- c. meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin;
- d. perluasan jangkauan pendidikan khusus bagi masyarakat miskin;
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;
- f. mengembangkan usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- g. meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin;
- h. meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Program-program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan sasaran yaitu meningkatnya angka partisipasi sekolah dari 99,7% menjadi 99,8% untuk anak usia sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK (APS SD 99,95%, APS SMP 99,85%, APS SMA 99,46% dan APS SMK 99,63%) dan meningkatnya

beasiswa dari 96% menjadi 97% untuk warga kota yang tidak mampu (untuk tingkat SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%).

- b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan sasaran yaitu meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 42% menjadi 47%
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan sasaran yaitu meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 5,03% menjadi 6,53%
- d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan sasaran yaitu menurunnya jumlah penganggur dari 6,08% menjadi 6%
- e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutamaan Gender dengan sasaran yaitu meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 44% menjadi 48%
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan sasaran yaitu meningkatnya PSKS sebesar 2%
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan sasaran yaitu menurunnya PMKS sebesar 2%
- h. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran yaitu terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 56% menjadi 62%
- i. Program Keluarga Berencana dengan sasaran yaitu terkendalinya / penurunan angka kelahiran dari CBR 15 menjadi 14
- j. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK dengan sasaran yaitu meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar
- k. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%

- I. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan jumlah rumah layak huni meningkat dari 90% menjadi 92%

Dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah serta dukungan dari masyarakat, maka angka kemiskinan pada tahun 2008 diharapkan terjadi penurunan sebesar antara 3%-5%.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.934.682.150,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

5. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

Tujuan rencana aksi daerah mewujudkan Yogyakarta kota sehat yaitu :

- a. meningkatkan *surveillance* kewaspadaan dini gizi buruk;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima;
- c. mengurangi angka kematian bayi dan balita;
- d. meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan;
- e. mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- g. meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju *universal coverage*.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan), *surveillance* serta monitoring kesehatan;
- b. meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, rumah sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 72% menjadi 74%
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 41% menjadi 47%
- c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan sasaran yaitu berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%
- d. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit dengan sasaran yaitu meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,73 menjadi 0,75
- e. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 48% menjadi 56%
- f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%
- g. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan dengan sasaran yaitu peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 38 unit menjadi 44 unit

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat dialokasikan anggaran sebesar Rp 25.613.584.969,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

6. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih

Tujuan rencana aksi daerah pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pemerintah yang bersih yaitu :

- a. meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;
- d. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur;
- e. melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- f. meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku;
- b. meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum;
- c. mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 79% menjadi 83%
- b. Program Peningkatan Pelayanan Hukum dengan sasaran yaitu penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 80%

menjadi 85% dan penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 84% menjadi 88%

- c. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%
- d. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dengan sasaran yaitu meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dengan sasaran yaitu menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 9% menjadi 8%
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 83 menjadi 86

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.712.655.982,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan rencana aksi daerah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

- a. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran;
- d. menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan
- e. merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja;
- f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- g. meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik;
- b. mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan;
- c. menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;
- d. meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum;
- e. meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif;
- f. meningkatkan manajemen pembangunan yang responsif gender;
- g. mewujudkan sistem dan prosedur sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Administrasi Perkantoran dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%
- b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operakting prosedur dari 72% menjadi 74%
- c. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu dengan sasaran yaitu tingkat kesiapan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sebesar 20%
- d. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 74% menjadi 78%
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 81% menjadi 85%

- f. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 83% menjadi 84,5%
- g. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%
- h. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%
- i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa dengan sasaran yaitu meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 72% menjadi 74%
- k. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan sasaran yaitu meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- l. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 81% menjadi 82%
- m. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 83% menjadi 85%
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 83% menjadi 86%
- o. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan sasaran yaitu meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 67% menjadi 75%

- p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan sasaran yaitu meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 62% menjadi 64%
- q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 82% menjadi 84%
- r. Program Peningkatan Layanan pada DPRD dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 83% menjadi 86%
- s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan dengan sasaran yaitu terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 64% menjadi 68%
- t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%
- u. Program Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 82% menjadi 84%
- v. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 83% menjadi 86%
- w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya penilaian BPK Wajar dari 86% menjadi 87%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dialokasikan anggaran sebesar Rp 112.864.242.527,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Tujuan rencana aksi daerah pembangunan sarana dan prasarana berkualitas yaitu :

- a. memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik;
- b. tertatanya kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. memudahkan masyarakat mempergunakan sarana prasarana publik;
- d. meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan sarana dan prasarana;
- e. meningkatkan sarana dan prasarana dasar publik perkotaan yang memadai bekerjasama dengan daerah tetangga, khususnya melalui Sekretariat Bersama Kartomantul;
- f. meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta;
- b. meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik;
- d. meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan;
- e. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan dengan sasaran yaitu meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 33% menjadi 50%
- b. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 5% menjadi 9%
- c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sasaran yaitu meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 66% menjadi 72%
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan sasaran yaitu peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 66% menjadi 72%
- e. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dengan sasaran yaitu meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 66% menjadi 72%
- f. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%
- g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 66% menjadi 72%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.147.336.760,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

9. Peningkatkan Kualitas Lingkungan

Tujuan rencana aksi daerah peningkatkan kualitas lingkungan yaitu :

- a. memperbaiki kualitas lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku lingkungan;
- c. menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau;
- d. menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan;
- f. meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan;
- g. mengendalikan pencemaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61% menjadi 62%
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan sasaran yaitu meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 81% menjadi 82%
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah dengan sasaran yaitu meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21% menjadi 22%

- d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sasaran yaitu mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26,8%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.596.778.640,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

10. Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yaitu :

- a. menjadikan prioritas utama kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana;
- c. mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- d. meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia dengan perencanaan wilayah yang peduli/ peka terhadap bencana;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam dengan sasaran yaitu meningkatnya *respond time* dari 150 menit menjadi 120 menit

- b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dengan sasaran yaitu meningkatnya *respond time* dari 14 menit menjadi 13 menit
- c. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase dengan sasaran yaitu kurangnya genangan air dari 84 titik menjadi 74 titik

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.191.862.500,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

II. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2008

Sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/NKB/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2008, secara ringkas target pencapaian kinerja yang terukur dari urusan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meratanya pemberian jaminan pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu (pemegang KMS) sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan biaya yang didukung dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat komunitas
 - b. meningkatnya mutu pendidikan melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, penelitian dan penulisan Karya Ilmiah
 - c. optimalisasi pengelolaan keuangan UPT Perpustakaan, UPT Jaminan Pendidikan, UPT Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada UPT Taman Pintar

2. Urusan Kesehatan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat baik melalui puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang didukung dengan meningkatkan pelayanan kesehatan pada keluarga miskin, lansia, anak, dan perempuan
 - b. meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat
 - c. meningkatkan pengendalian penyakit pada masyarakat baik menular dan tidak menular
3. Urusan Pekerjaan Umum, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. mempertahankan kualitas pelayanan bidang pekerjaan umum, melalui perbaikan dan peningkatan jalan, saluran drainase, penerangan jalan umum, talud
 - b. meningkatkan dan pemeliharaan penerangan jalan kampung / lingkungan
4. Urusan Perumahan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. perbaikan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman
 - b. bantuan stimulan perbaikan rumah
 - c. perbaikan manajemen penanganan bencana alam
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana alam
5. Urusan Perencanaan Pembangunan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. tersusunnya dan meningkatnya kualitas berbagai dokumen perencanaan
 - b. penjaringan aspirasi masyarakat
 - c. pengendalian dan evaluasi pembangunan
 - d. tersusunnya data dan statistik, serta pengembangan penelitian
6. Urusan Perhubungan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. memperbaiki dan meningkatkan pelayanan transportasi pada masyarakat
 - b. meningkatkan kelancaran transportasi
 - c. meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas

7. Urusan Lingkungan Hidup, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan
 - b. meningkatkan daya dukungan lingkungan terhadap perkembangan aktifitas masyarakat
 - c. meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan perbaikan pelayanan sanitasi perkotaan
 - d. meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meningkatkan pelayanan kependudukan dan penguatan basis data kependudukan
 - b. meningkatnya pelayanan keluarga berencana melalui pembinaan keluarga sejahtera
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meningkatkan indeks pembangunan gender dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, lansia dan difabel
 - b. memperkuat rumusan kebijakan dalam pembangunan berperspektif gender
10. Urusan Sosial, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat
 - b. meningkatkan upaya mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, antara lain kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, difabel dan anak terlantar serta penyakit masyarakat
11. Urusan Tenaga Kerja, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. meningkatkan pelayanan dibidang ketenagakerjaan
 - b. mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan kesempatan dan lapangan kerja
 - c. meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja
12. Urusan Koperasi dan UMK, target kinerja yang akan dicapai adalah
 - a. peningkatan pelayanan koperasi dan UMKMK

- b. fasilitasi penerapan teknologi sederhana
 - c. fasilitasi pemasaran
 - d. fasilitasi permodalan pada UMKMK
13. Urusan Kebudayaan, target kinerja yang akan dicapai adalah
- a. mempertahankan dan mengembangkan budaya Kota Yogyakarta
 - b. peningkatan fasilitasi pada seni dan budaya masyarakat
14. Urusan Pemuda dan Olah Raga, target kinerja yang akan dicapai adalah
- a. meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat
 - b. meningkatkan pembinaan dan pengembangan olah raga
15. Urusan Pemerintahan Umum, target kinerja yang akan dicapai adalah
- a. peningkatan pelayanan kedinasan
 - b. peningkatan pelayanan perijinan
 - c. meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
 - d. meningkatkan manajemen pemerintahan
 - e. memperkuat rumusan kebijakan dalam pembangunan dan pemerintahan
16. Urusan Pertanian, target kinerjanya adalah
- a. meningkatkan pelayanan, pengembangan, pemasaran budidaya pertanian perkotaan dan perikanan
 - b. memperkuat manajemen pengelolaan usaha pertanian dan perikanan
 - c. peningkatan pengawasan mutu bahan pangan
 - d. meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyakit yang berasal dari hewan
17. Urusan Pariwisata, target kinerja yang akan dicapai adalah
- a. meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
 - b. meningkatkan dan pengembangan pemasaran/promosi pariwisata
18. Urusan Perdagangan, target kinerja yang akan dicapai adalah
- a. meningkatkan nilai penjualan barang
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan pasar dari sisi kebersihan, keamanan dan ketertiban

III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 sebagaimana gambaran kerangka ekonomi makro daerah dan implikasi terhadap sumber pendanaan yang telah dijelaskan dalam kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008, maka beberapa pertimbangan yang akan dijadikan dasar proyeksi pendapatan dan belanja adalah dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada Tahun 2008 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,26% dengan tingkat inflasi pada kisaran 9,44%, sehingga PDRB Kota Yogyakarta berdasarkan harga konstan tahun 2000 diperkirakan akan mencapai Rp 4.857.180.000.000,-
- b. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan pada tahun 2008 sebesar Rp 119.450.448.554,- atau mengalami peningkatan sebesar 14,68%, dibandingkan dengan PAD dalam Perubahan APBD TA 2007 sebesar Rp 104,162,882,000,-
- c. Dana Perimbangan diperkirakan pada tahun 2008 sebesar Rp 495.820.428.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 15,07% dibandingkan Perubahan APBD TA 2007 sebesar Rp 430,868,718,000,-
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan pada tahun 2008 sebesar Rp 43.245.399.840,- atau mengalami penurunan sebesar 11,45% dari Perubahan APBD TA 2007 sebesar Rp 48,838,680,000,-
- e. Belanja Daerah diperkirakan pada tahun 2008 sebesar Rp 729.684.583.060,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,57% dibandingkan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD TA 2007 sebesar Rp 672,061,916,104,-

Ringkasan proyeksi APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 selengkapnya sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1
RINGKASAN PROYEKSI APBD TAHUN ANGGARAN 2008

URAIAN	Tahun Anggaran 2007	Proyeksi Tahun Anggaran 2008	Bertambah / Berkurang	
			Rp	%
PENDAPATAN	583,870,280,000	658,516,276,394	74,645,996,394	12.78%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	104,162,882,000	119,450,448,554	15,287,566,554	14.68%
Pajak Daerah	49,274,000,000	63,574,000,000	14,300,000,000	29.02%
Retribusi Daerah	29,092,692,000	30,694,250,554	1,601,558,554	5.51%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,799,505,000	8,194,513,000	(604,992,000)	-6.88%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	16,996,685,000	16,987,685,000	(9,000,000)	-0.05%
DANA PERIMBANGAN	430,868,718,000	495,820,428,000	64,951,710,000	15.07%
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39,038,718,000	52,325,198,000	13,286,480,000	34.03%
Dana Alokasi Umum	365,042,000,000	411,257,230,000	46,215,230,000	12.66%
Dana Alokasi Khusus	26,788,000,000	32,238,000,000	5,450,000,000	20.34%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48,838,680,000	43,245,399,840	(5,593,280,160)	-11.45%
Hibah	4,988,769,000	-	(4,988,769,000)	
Dana Darurat	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,069,791,000	41,257,799,840	5,188,008,840	14.38%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	1,987,600,000	1,987,600,000	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,780,120,000	-	(7,780,120,000)	
BELANJA	672,061,916,104	729,684,583,060	57,622,666,956	8.57%
Belanja Tidak Langsung	389,768,784,628	458,383,216,785	68,614,432,157	17.60%
Belanja Pegawai	313,551,176,304	378,194,000,222	64,642,823,918	20.62%
Belanja Bunga	707,120,555	578,508,500	(128,612,055)	-18.19%
Belanja Subsidi	307,192,000	-	(307,192,000)	
Belanja Hibah	-	17,678,947,900	17,678,947,900	
Belanja Bantuan Sosial	62,875,796,994	45,532,030,163	(17,343,766,831)	-27.58%
Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	12,327,498,775	16,399,730,000	4,072,231,225	33.03%
Belanja Langsung	282,293,131,476	271,301,366,275	(10,991,765,201)	-3.89%
Belanja Pegawai	79,172,400,934	84,041,385,250	4,868,984,316	6.15%
Belanja Barang dan Jasa	102,454,936,051	99,750,041,621	(2,704,894,430)	-2.64%
Belanja Modal	100,665,794,491	87,509,939,404	(13,155,855,087)	-13.07%
Surplus/Defisit	(88,191,636,104)	(71,168,306,666)	17,023,329,438	-19.30%

URAIAN	Tahun Anggaran 2007	Proyeksi Tahun Anggaran 2008	Bertambah / Berkurang	
			Rp	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	90,610,460,326	82,509,201,316	(8,101,259,010)	-8.94%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	90,610,460,326	82,509,201,316	(8,101,259,010)	-8.94%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	2,418,824,222	11,340,894,650	8,922,070,428	368.86%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	10,446,000,000	10,446,000,000	-
Pembayaran Pokok Utang	958,824,222	894,894,650	(63,929,572)	-6.67%
Pemberian Pinjaman Daerah	1,460,000,000	-	(1,460,000,000)	-100.00%
Pembiayaan Netto	88,191,636,104	71,168,306,666	(17,023,329,438)	-19.30%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

Prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2008

1. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.072.168 menjadi 1.429.126 lama tinggal dari 2 hari menjadi 2,38 hari		3,291,078,000
1 Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata		Dinas Parsenibud	1,244,900,000
2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisata		Dinas Parsenibud	427,210,000
3 Pembinaan Industri Kepariwisata		Dinas Parsenibud	258,977,000
4 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Kepariwisata		Dinas Parsenibud	1,359,991,000
Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 135 menjadi 158 kekayaan budaya		2,029,171,100
1 Festival, Lomba dan Gelar Seni dan Budaya		Dinas Parsenibud	1,595,975,000
2 Pelestarian Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya		Dinas Parsenibud	433,196,100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (1)	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%		106,861,000
1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata		BAPPEDA	106,861,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa (1)	Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%		224,700,000
1 Pameran Sekaten		BID	224,700,000
Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.300 titik menjadi 17.700 titik		4,056,977,000
1 Peningkatan PJU Kampung		Din. Kimpraswil	700,000,000
2 Peningkatan PJU Lingkungan		Din. Kimpraswil	500,000,000
3 Pemeliharaan & Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel		Din. Kimpraswil	2,856,977,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan (1)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%		5,806,939,000
1 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni		BPBD	5,806,939,000
JUMLAH			15,515,726,100

2. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Setrifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana	<p>Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 18% menjadi 33 %</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 76% menjadi 82%</p> <p>Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 76% menjadi 82%</p> <p>Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 56% menjadi 62%</p>		16,060,926,500
1 Peningkatan Kualifikasi Kompentensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan	263,786,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan		Dinas Pendidikan	1,278,645,000
3 Akreditasi Sekolah Swasta		Dinas Pendidikan	27,925,500
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK)		Dinas Pendidikan	14,490,570,000
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya kualitas pendidikan dari 89% menjadi 92%		28,589,532,600
1 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri		Dinas Pendidikan	8,679,462,600
2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan		Dinas Pendidikan	78,732,000
3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar		Dinas Pendidikan	1,887,476,000
4 Penyelenggaraan Ulangan Umum		Dinas Pendidikan	236,262,300
5 Penerimaan Siswa Baru On Line		Dinas Pendidikan	197,734,000
6 Pengembangan Kesiswaan		Dinas Pendidikan	331,888,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
7 Penerbitan Media Komunikasi		Dinas Pendidikan	41,717,000
8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan	163,495,000
9 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A,B dan C		Dinas Pendidikan	282,244,000
10 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus		Dinas Pendidikan	60,268,000
11 Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP, SMA, SMK		Dinas Pendidikan	54,363,000
12 Usaha Kesehatan Sekolah & Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sekolah		Dinas Pendidikan	76,504,000
13 Penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan		Dinas Pendidikan	50,655,000
14 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan	128,704,000
15 Pengembangan Minat Baca dan Seni Siswa		Dinas Pendidikan	182,480,000
16 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Dinas Pendidikan	236,444,500
17 Pengelolaan dan Pemberian bantuan PAUD		Dinas Pendidikan	93,631,200
18 Pengelolaan Data Kependidikan		Dinas Pendidikan	88,055,300
19 Pembinaan Karier Pegawai		Dinas Pendidikan	10,976,829,000
20 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran		Dinas Pendidikan	121,490,000
21 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris		Dinas Pendidikan	54,065,000
22 Peningkatan Operasional Taman Pintar		Dinas Pendidikan	588,596,100
23 Pengembangan Kota Vokasi		Dinas Pendidikan	3,978,436,600
Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan	Diperolehnya baku mutu diatas rata-rata 2% menjadi 4%		80,280,000
1 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan		Dinas Pendidikan	80,280,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan (2)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%		4,548,174,547
1 Peningkatan Sarana Prasarana Gedung SD (Conblock SD)		BPBD	929,438,750
2 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan dan Timur		BPBD	574,059,500
3 Penyempurnaan Fasilitas Pendidikan (Keramik)		BPBD	613,000,000
4 Pembangunan Taman Pintar		BPBD	2,000,000,000
5 Pembangunan Taman Pintar (L)		BPBD	431,676,297
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%		125,826,000
1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan		Kesbangpor	125,826,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4%		171,442,500
1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda		Kesbangpor	171,442,500
Program Fasilitas Olah Raga	Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%		119,394,000
1 Pembinaan & Pengembangan Olah Raga		Kesbangpor	119,394,000
JUMLAH			49,695,576,147

3. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 76% menjadi 82% Ketersediaan regulasi perizinan dari 48% menjadi 56%		743,525,500
1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan		Dinas Perizinan	273,011,000
2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perijinan		Dinas Perizinan	228,740,000
3 Pengawasan dan Pengaduan Perijinan di Kota		Dinas Perizinan	71,526,000
4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perijinan		Dinas Perizinan	11,597,000
5 Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan		Dinas Perizinan	158,651,500
Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKMK (1)	Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar		896,423,000
1 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia		Disperindakop	104,420,000
2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah		Disperindakop	51,945,000
3 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi		Disperindakop	76,230,000
4 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP		Disperindakop	204,827,000
5 Pembinaan Koperasi		Disperindakop	220,076,000
6 Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranas		Disperindakop	238,925,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63% menjadi 66 %		112,850,000
1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK		Disperindakop	112,850,000
Program Peningkatan Perdagangan	Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 69% menjadi 73%		1,299,229,500
1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan		Disperindakop	124,319,000
2 Pembuatan Ajungan Pemkot di PMPS		Disperindakop	201,078,000
3 Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil		Disperindakop	623,360,000
4 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan		Disperindakop	165,137,500
5 Pembinaan Pedagang Kaki lima		Disperindakop	185,335,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelas menjadi 111 kelas terdiri dari : kelas utama yaitu dari 2 kelas menjadi 3 kelas, kelas madya dari 10 kelas menjadi 14 kelas, kelas lanjut dari 27 kelas menjadi 27 kelas, kelas pemula dari 70 kelas menjadi 67 kelas		4,335,683,500
1 Pengembangan 3 UPTD		Kantor Pertanian dan Kehewananan	190,278,500
2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis (PIH)		Kantor Pertanian dan Kehewananan	118,336,000
3 Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan		Kantor Pertanian dan Kehewananan	127,628,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
4 Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan		Kantor Pertanian dan Kehewanan	119,882,000
5 Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Pertanian (DAK)		Kantor Pertanian dan Kehewanan	2,089,984,000
6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Pemasaran Hasil Perikanan Kota (DAK)		Kantor Pertanian dan Kehewanan	1,689,575,000
Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 82% menjadi 84%, keamanan dari 87% menjadi 89%, kebersihan >30' menjadi <30')		4,100,420,500
1 Pembinaan dan Penataan Pedagang		Dinlopas	44,096,000
2 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar		Dinlopas	1,422,405,000
3 Peningkatan Kebersihan Pasar		Dinlopas	1,139,896,000
4 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar		Dinlopas	606,712,000
5 Pemeliharaan Pasar Tersebar		Dinlopas	887,311,500
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%		150,559,000
1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja		Dinakertrans	95,670,000
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3		Dinakertrans	54,889,000
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban (1)	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%		337,364,000
1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi		Dinas Ketertiban	337,364,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%		413,034,000
1 Penyusunan Pra FS Aset Daerah		BAPPEDA	413,034,000
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian & Pendapatan Daerah	Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74% menjadi 78%		1,127,974,000
1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah		Bagian P2D	742,389,000
2 Peningkatan Pemanfaatan Pengelolaan Aset Daerah		Bagian P2D	385,585,000
Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah	Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 10% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 2.5%		3,511,857,500
1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan		KPPD	72,738,000
2 Optimalisasi Pajak Reklame		KPPD	133,672,000
3 Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran		KPPD	51,162,000
4 Optimalisasi Pajak Hiburan		KPPD	30,700,000
5 Optimalisasi Pajak Parkir		KPPD	30,970,000
6 Optimalisasi PBB dan BPHTB		KPPD	676,740,000
7 Pendataan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran		KPPD	2,147,168,000
8 Pembinaan, Penyuluhan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak		KPPD	192,447,500
9 Pengadaan Barang		KPPD	176,260,000
JUMLAH			17,028,920,500

4. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,7% menjadi 99,8% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99,95%; APS SMP 99,85%; APS SMA 99,46%; APS SMK 99,63%)		193,200,000
1 Pengelolaan Pemberian Beasiswa	Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 97% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%, SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%)	Dinas Pendidikan	193,200,000
Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya layanan Asuransi Kesehatan bagi seluruh masyarakat 42% menjadi 47%		5,591,207,000
1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Kelompok		Dinas kesehatan	4,636,707,000
2 Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin		R S U D	954,500,000
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 5.03% menjadi 6,53%		647,437,600
1 Pendidikan & Pelatihan bagi Pencari Kerja		Dinas Nakertrans	611,717,600
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja		Dinas Nakertrans	35,720,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian 3 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Menurunnya jumlah penganggur dari 6,08% menjadi 6%	Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans	304,447,000 80,127,000 108,651,000 115,669,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutamaan Gender 1 Pengarustamaan Gender 2 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan	Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 44% menjadi 48%	Bag. Kesmas PUG Bag. Kesmas PUG	496,271,000 298,500,000 197,771,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos	Meningkatnya PSKS sebesar 2%	Dinas Kesos Dinas Kesos	825,239,000 492,374,000 332,865,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 2 Peningkatan Pelayanan Kesos dalam Panti Sosial 3 Santunan Kematian Pemegang KTP 4 Peningkatan Pelayanan PMKS 5 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma 7 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 8 Pendataan PMKS dan PSKS	Menurunnya PMKS sebesar 2%	Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos	2,068,091,750 294,738,000 57,438,000 67,123,000 218,455,000 487,235,000 338,210,000 340,887,750 173,740,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial		Dinas Kesos	90,265,000
Program fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 56% menjadi 62%		423,117,000
1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan		Bag. Kesmas PUG	105,467,000
2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		Bag. Kesmas PUG	317,650,000
Program Keluarga Berencana	Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 15 menjadi 14	BKKBC	640,266,800
1 Peningkatan KB dan Keluarga Sejahtera (DAK)		BKKBC	640,266,800
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK (2)	Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar		869,540,000
1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan		Disperindakop	102,880,000
2 Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil		Disperindakop	188,150,000
3 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah		Disperindakop	578,510,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan (3)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%		1,363,365,000
1 Pembangunan Pagar Bangunan Panti Wreda dan Panti Asuhan		BPBD	538,365,000
2 Pembangunan Panti Karya		BPBD	825,000,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (1)	Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%		2,512,500,000
1 Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK)		Dinas Kimpraswil	2,312,500,000
2 Counterpart Pengembangan/Pelaksanaan Perumahan Sederhana		Dinas Kimpraswil	200,000,000
JUMLAH			15,934,682,150

5. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 72% menjadi 74%		970,705,000
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan		Dinas Kesehatan	671,667,000
2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS		Dinas Kesehatan	132,742,000
3 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi		Dinas Kesehatan	166,296,000
Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 41% menjadi 47%		741,045,000
1 Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan	741,045,000
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%		1,908,573,700
1 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular		Dinas Kesehatan	1,439,003,700
2 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan		Dinas Kesehatan	384,131,000
3 Pengendalian Penyakit Zoonosa		Kantor Pertanian & Kehewan	85,439,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit 1 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengelolaan Operasional Puskesmas 2 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan, Penelitian & Pengembangan Kesehatan 3 Pelayanan Administrasi Pasien 4 Pelayanan Penunjang Medis 5 Pelayanan Penunjang Non Medis 7 Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,73 menjadi 0,75	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan R S U D R S U D R S U D R S U D R S U D	16,617,211,105 4,501,699,500 2,505,081,200 302,351,300 3,507,339,500 4,787,390,000 425,243,000 320,231,605 267,875,000
Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan 1 Pengelolaan SDM dan Institusi Pelayanan Kesehatan 2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi bidang Kesehatan	Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 48% menjadi 56%	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	318,201,000 154,381,500 163,819,500
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan (4) 1 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD 2 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan 3 Rehabilitasi Puskesmas Tersebar	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%	BPBD BPBD BPBD	4,802,259,549 2,785,635,000 1,306,001,500 710,623,049

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%		172,449,615
1 Pemeliharaan Puskesmas Tersebar		BPBD	172,449,615
Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan	Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 38 unit menjadi 44 unit		83,140,000
1 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan		Kantor Pertanian & Kehewanan	83,140,000
JUMLAH			25,613,584,969

6. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 79% menjadi 83%		433,316,000
1 Pengolahan Data Hukum/Penyusunan Renja Raperda		Bagian Hukum	316,416,000
2 Pengkajian Peraturan Daerah		Bagian Hukum	116,900,000
Program Peningkatan Pelayanan Hukum	Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 80% menjadi 85% Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 84% menjadi 88%		825,706,000
1 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta		Bag.Hukum	346,660,000
2 Pembuatan dan Penerbitan LD dan Pengembangan JDI-H		Bagian Hukum	154,946,000
3 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM		Bagian Hukum	99,720,000
4 Publikasi RPD ke Media Cetak		Bagian Hukum	224,380,000
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban (2)	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%		1,645,183,300
1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		Dinas Ketertiban	355,643,300
2 Operasi dan Patroli Ketertiban Umum		Dinas Ketertiban	452,609,000
3 Pengamanan Khusus		Dinas Ketertiban	587,412,000
4 Penyelenggaraan Pemberantasan Pekat		Dinas Ketertiban	249,519,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama	Bag.Kesmas & PUG	18,110,000
1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Keagamaan dan Kemasyarakatan		Bag.Kesmas & PUG	18,110,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 9% menjadi 8%		714,720,000
1 Pemeriksaan Reguler		Bawasda	458,332,000
2 Pemeriksaan Khusus		Bawasda	197,058,000
3 Evaluasi Lakip		Bawasda	15,860,000
4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi		Bawasda	43,470,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 83 menjadi 86		1,075,620,682
1 Pelaksanaan Analisa Jabatan		Bag. Organisasi	232,010,000
2 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah		Bag. Organisasi	259,035,000
3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bag. Organisasi	128,835,500
4 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Bag. Organisasi	125,697,682
5 Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah		Bag. Organisasi	330,042,500
JUMLAH			4,712,655,982

7. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		54,113,969,159
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran		Dinas Pendidikan	5,479,937,000
		Dinas Kesehatan	3,920,807,600
		RSUD	3,020,499,000
		Dinas Kimpraswil	7,803,270,000
		Kantor Limas & PK	1,210,805,350
		BAPPEDA	243,096,750
		Dinas Perhubungan	2,359,811,200
		Dinas Lingkungan Hidup	6,111,296,925
		BKKBC	451,194,100
		Dinas Kesos	591,474,400
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	231,801,650
		Dinas Perindagkop	247,961,650
		Dinas Pansenbud	192,403,500
		Kantor Kesbangpor	75,456,000
		Dinas Ketertiban	2,288,285,700
		Sekda dan Ass Sekda	134,182,200
		Bagian Tapem	98,722,000
		Bagian Dalbang	104,022,450
		Bagian Hukum	125,108,750
		Bagian Organisasi	136,242,750
		Bagian Umum	1,499,685,950
		Bagian P2D	77,087,000
		Bagian Protokol	674,580,400
		Bagian Kerjasama	124,456,250

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
		Bag. Kesmas & PUG	90,112,450
		Sekretariat DPRD	2,596,846,750
		BPKD	1,133,807,750
		Bawasda	259,610,700
		Kec. Tegalrejo	408,092,300
		Kec. Jetis	356,123,615
		Kec. Gondokusuman	431,588,250
		Kec. Danurejan	422,873,575
		Kec. Gedongtengen	287,845,300
		Kec. Pakualaman	286,052,120
		Kec. Ngampilan	259,916,675
		Kec. Wirobrajan	324,865,100
		Kec. Mantrijeron	327,530,500
		Kec. Kraton	317,346,500
		Kec. Gondomanan	275,285,000
		Kec. Mergangsan	326,823,500
		Kec. Umbulharjo	602,602,300
		Kec. Kotagede	341,396,250
		BPBD	1,922,511,920
		KPPD	471,494,400
		Dinas Perizinan	459,926,750
		Sekretariat KPUD	97,588,744
		BKD	433,326,950
		BID	705,790,900
		Kantor Pertanian dan Kehewanan	815,777,085
		Din. Pengelolaan Pasar	2,956,645,200

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 72% menjadi 74%		1,467,809,000
1 Penilaian Angka Kredit		BKD	73,809,000
2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		BKD	68,736,000
3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai		BKD	127,590,000
4 Rekrutmen Pegawai		BKD	741,396,000
5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat		BKD	195,655,000
6 Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana & Hukuman Disipin		BKD	57,782,000
7 Pengelolaan Data SIMPEG dan File Pegawai		BKD	55,443,000
8 Penilaian Kinerja Pegawai		BKD	65,170,000
9 Pengelolaan Data PTT		BKD	30,249,000
10 Identifikasi Kebutuhan Sumberdaya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga		BKD	16,819,000
11 Tes Kesehatan PNS		BKD	35,160,000
Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/ PEMILU	Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 20%		42,822,500
1 Dinamisasi Politik Lokal		Sekretariat KPU	42,822,500
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 74% menjadi 78%		2,774,939,600
1 Pembinaan PPNS		Dinas Ketertiban	109,180,000
2 Peningkatan Kualitas Pol PP		Dinas Ketertiban	385,589,600
3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya		Dinas Ketertiban	76,501,000
4 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawas		Bawasda	198,329,000
5 Penyelenggaraan Diklat		BKD	1,585,520,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
6 Pengiriman Tugas Belajar & Pemberian Bantuan Ijin Belajar bagi PNS Daerah		BKD	419,820,000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 81% menjadi 85%		481,383,000
1 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah		Bagian Protokol	128,338,000
2 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Seremonial Lainnya		Bagian Protokol	322,400,000
3 Pembutan Naskah Sambutan		Bagian Protokol	30,645,000
Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 83% menjadi 84.5%		1,568,287,500
1 Pengasuransian Barang Daerah		BPBD	832,825,000
2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana, DKB/DKPB, RKB/RKPBU		BPBD	33,310,000
3 Penghapusan Barang Daerah		BPBD	111,205,000
4 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Barang		BPBD	78,270,000
5 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta		BPBD	90,870,000
6 Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008		BPBD	306,120,000
7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah		BPBD	73,672,500
8 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah		BPBD	42,015,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan (5)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%		24,547,783,168
1 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta		BPBD	1,787,635,000
2 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor		BPBD	3,033,755,000
3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		BPBD	1,774,830,000
4 Pembuatan Tandon Air KPMK		BPBD	175,200,000
5 UPT COR Logam		BPBD	1,507,020,380
6 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran		BPBD	750,000,000
7 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran		BPBD	2,021,900,000
8 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum		BPBD	1,784,368,500
9 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan		BPBD	5,447,300,000
10 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Pendidikan		BPBD	508,500,000
11 Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan (Kranisasi)		BPBD	143,461,388
12 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah		BPBD	100,000,000
13 Pembangunan Kantor Depag Kota Yogyakarta		BPBD	1,899,465,000
14 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik		Bagian Tapem	1,352,020,000
15 Pembangunan Pasar Tunjungsari		BPBD	750,000,000
16 Pembangunan Gedung Ex DPRD Tahap III		BPBD	361,458,900
17 UPT COR Logam (L)		BPBD	1,150,869,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%		2,584,817,650
1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah		BPBD	1,804,817,650
2 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor/Alat Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta		BPBD	580,000,000
3 Pemeliharaan dan Peningkatan Pasar Tersebar		BPBD	200,000,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (2)	Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%	BID	6,877,900,475
1 Pelayanan Program Kota melalui Berbagai Media		BID	2,539,881,000
2 Pengelolaan UPIK		BID	45,487,500
3 Penerbitan Majalah Ayodya		BID	74,985,000
5 Peningkatan Sistem Pengamanan Jaringan		BID	853,623,725
6 Pengembangan dan Pengelolaan E.GOV		BID	1,181,476,500
7 Pembinaan Pengembangan IT		BID	2,109,137,750
8 Penyusunan Media Publikasi		BID	73,309,000
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 72% menjadi 74%		535,684,500
1 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan		Bagian Kerjasama	228,597,000
2 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah		Bagian Kerjasama	307,087,500

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%		13,575,000
1 Pengkajian & Penelitian Bidang informasi & Komunikasi		BID	13,575,000
Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 81%menjadi 82%		189,180,000
1 Pengelolaan Arsip Daerah		BID	94,895,000
2 Pengembangan Arsip Daerah		BID	94,285,000
Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 83 menjadi 85%		206,051,250
Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan			206,051,250
Program Peningkatan Pelayanan ke Rumah Tanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 83%menjadi 86%		448,372,750
1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah		Bagian Umum	163,510,500
2 Pelayanan Kerumahtanggan		Bagian Umum	284,862,250

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya database kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 67% menjadi 75%		1,000,852,175
1 Pembuatan KTP/KIA dan KK di Kota Yogyakarta		BKKBC	562,336,840
2 Pembuatan Buku Register dan Akta Catatan Sipil		BKKBC	124,706,410
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		BKKBC	69,578,925
4 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil		BKKBC	244,230,000
Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 62% menjadi 64%		251,446,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Tegalrejo	32,151,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Jetis	5,363,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,280,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Gondokusuman	21,174,500
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Danurejan	22,322,000
2 Penyebarluasan Informasi			6,715,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Gedongtengen	12,147,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Pakualaman	10,378,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Ngampilan	10,582,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Kec. Wirobrajan	15,104,000	
2 Penyebarluasan Informasi		3,040,000	

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Mantrijeron	5,461,500
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Kraton	4,999,500
2 Penyebarluasan Informasi			3,670,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Gondomanan	17,776,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,280,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Mergangsan	11,953,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,190,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Umbulharjo	28,280,500
2 Penyebarluasan Informasi			4,340,000
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan		Kec. Kotagede	4,959,000
2 Penyebarluasan Informasi			3,040,000
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan , evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 82% menjadi 84%		1,212,322,200
1 Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem		Bagian Tapem	378,169,500
2 Penyusunan LKPJ 2007 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah		Bagian Tapem	85,768,000
3 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan		Bagian Tapem	264,373,500
4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan		Bagian Tapem	106,820,000
5 Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan		Bagian Tapem	110,795,700
6 Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah		Bagian Tapem	127,465,500

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
7 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, Pensertifikatan Tanah		Bagian Tapem	138,930,000
Program Peningkatan Layanan pada DPRD	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 83% menjadi 86%		8,808,150,700
1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat		Sekretariat DPRD	491,520,000
2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD		Sekretariat DPRD	369,195,000
3 Pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD		Sekretariat DPRD	1,319,400,000
4 Penetapan Perda-Perda		Sekretariat DPRD	2,162,885,000
5 Pembahasan RAPBD		Sekretariat DPRD	286,284,000
6 Pembuatan KU dan PPAS		Sekretariat DPRD	231,268,000
7 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD		Sekretariat DPRD	2,713,095,000
8 Publikasi Kegiatan DPRD/ Kehumasan dan Protokoler DPRD		Sekretariat DPRD	801,761,000
9 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik		Sekretariat DPRD	92,495,000
10 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD serta Penyedia Jasa Cleaning Service		Sekretariat DPRD	145,262,700
11 Pemilihan Anggota Tim Seleksi KPU oleh DPRD		Sekretariat DPRD	194,985,000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 64% menjadi 68%		1,615,251,000
1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat		Bagian Tapem	1,615,251,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2)	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%		919,642,500
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		BAPPEDA	726,270,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pelayanan dan Sarana Prasarana		BAPPEDA	193,372,500
Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 82% menjadi 84%		243,984,900
1 Penelitian dan Pengembangan		BAPPEDA	243,984,900
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 83% menjadi 86%		965,043,500
1 Pengendalian Kegiatan		Bagian Pengendalian Pembangunan	299,953,000
2 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa		Bagian Pengendalian Pembangunan	54,316,000
3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		Bagian Pengendalian Pembangunan	485,542,000
4 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		BAPPEDA	125,232,500
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 86% menjadi 87%		1,994,974,000
1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD		BPKD	557,165,000
2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		BPKD	365,510,000
3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah		BPKD	477,448,000
4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah		BPKD	140,506,000
5 Pengelolaan Anggaran Bantuan		BPKD	49,360,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
6 Pengelolaan Dana Perimbangan		BPKD	104,010,000
7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran		BPKD	135,705,000
8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa		BPKD	34,130,000
9 Implementasi SAKD		BPKD	88,620,000
10 Pengelolaan Investasi Dana Daerah		BPKD	42,520,000
JUMLAH			112,864,242,527

8. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan	Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 33% menjadi 50%		299,990,960
1 Penyusunan Rencana Rinci dan Detail Kawasan		Dinas Kimpraswil	149,992,000
2 Pemantuan dan Pengembangan Data Base Tata Ruang dan Tata Bangunan		Dinas Kimpraswil	149,998,960
Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 5% menjadi 9%		9,443,225,600
1 Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan		Dinas Kimpraswil	920,248,600
2 Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (L)		Dinas Kimpraswil	120,187,000
3 Peningkatan & Pemeliharaan Bangunan Pelengkap & Perlengkapan Jalan (BPPJ)		Dinas Kimpraswil	1,471,500,000
4 Peningkatan Jalan (DAK)		Dinas Kimpraswil	6,235,160,000
5 Peningkatan & Pemeliharaan Peralatan Perbekalan		Dinas Kimpraswil	339,130,000
6 Normalisasi Simpang		Dinas Kimpraswil	357,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 66% menjadi 72%		986,641,000
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB		Dinas Perhubungan	383,986,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan		Dinas Perhubungan	602,655,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 66% menjadi 72%		602,751,000
1 Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Umum		Dinas Perhubungan	302,475,000
2 Optimalisasi Perijinan Angkutan		Dinas Perhubungan	199,626,000
3 Operasional SAUM		Dinas Perhubungan	100,650,000
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas	Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 66% menjadi 72%		633,646,000
1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda & Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan		Dinas Perhubungan	328,326,000
2 Survey Bidang Lalu Lintas		Dinas Perhubungan	92,160,000
3 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran		Dinas Perhubungan	213,160,000
Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (2)	Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%		996,078,200
1 Pemeliharaan TPU		Dinas Kimpraswil	596,078,200
2 Perencanaan dan Penataan Prasarana Dasar Permukiman		Dinas Kimpraswil	400,000,000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 66% menjadi 72%		185,004,000
1 Pengadaan Penyedia Jasa TKP		Dinas Perhubungan	185,004,000
JUMLAH			13,147,336,760

9. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61% menjadi 62%		2,466,044,810
1 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan		DLH	585,316,000
2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan & SAL		DLH	227,178,000
3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan dan Air Bawah Tanah		DLH	80,555,000
4 Prokasih GKS		DLH	65,556,750
5 Program Langit Biru (Prolabir)		DLH	195,370,060
6 Pembinaan & Evaluasi Kebersihan Lingkungan		DLH	67,549,000
7 Sarana Prasarana Pemantuan Kualitas Lingkungan (DAK)		DLH	1,244,520,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81% menjadi 82%		6,760,705,125
1 Pembersihan Sampah		DLH	2,434,652,725
2 Pengangkutan Sampah		DLH	2,836,782,400
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan dan SAL		DLH	478,110,000
4 Perbengkelan		DLH	1,011,160,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21% menjadi 22%		1,918,764,110
1 Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)		DLH	1,080,946,750
2 Pemeliharaan & Peningkatan Sarana Prasarana SAL		DLH	837,817,360
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26,8%		1,451,264,595
1 Pemeliharaan & Peningkatan Taman Kota		DLH	1,249,261,095
2 Pemeliharaan & Peningkatan Jalur Hijau		DLH	202,003,500
JUMLAH			12,596,778,640

10. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Program / Kegiatan	Sasaran Program	SKPD	Plafon Anggaran
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatkan respond time dari 150 menit menjadi 120 menit		293,705,000
1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat		Kantor Linmas dan PK	182,420,000
2 Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana		Kantor Linmas dan PK	111,285,000
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatkan respond time dari 14 menit menjadi 13 menit		669,232,500
1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		Kantor Linmas dan PK	108,962,500
2 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		Kantor Linmas dan PK	560,270,000
Program Perbaikan / Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase	Kurangnya genangan air dari 84 titik menjadi 74 titik		3,228,925,000
1 Normalisasi Drainase		Dinas Kimpraswil	400,000,000
2 Normalisasi Saluran Pengairan		Dinas Kimpraswil	813,755,000
3 Rehabilitasi Bangunan Air (DAK)		Dinas Kimpraswil	1,553,975,000
4 Pemeliharaan Pengairan & Drainase		Dinas Kimpraswil	461,195,000
JUMLAH			4,191,862,500

V. PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI / SKPD

Plafon anggaran menurut organisasi/SKPD yang dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 3
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1	URUSAN WAJIB			
1 01	PENDIDIKAN	195,789,063,969	50,403,876,100	246,192,940,069
1 01 01	Dinas Pendidikan	195,789,063,969	50,403,876,100	246,192,940,069
1 02	KESEHATAN	30,785,088,482	33,002,810,405	63,787,898,887
1 02 01	Dinas Kesehatan	22,272,538,423	19,719,732,300	41,992,270,723
1 02 02	RSUD	8,512,550,059	13,283,078,105	21,795,628,164
1 03	PEKERJAAN UMUM	5,052,327,053	24,532,397,600	29,584,724,653
1 03 06	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	5,052,327,053	24,532,397,600	29,584,724,653
1 04	PERUMAHAN	1,678,111,807	5,682,321,050	7,360,432,857
1 04 06	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	-	3,508,578,200	3,508,578,200
1 04 04	Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran	1,678,111,807	2,173,742,850	3,851,854,657
1 05	PENATAAN RUANG	-	299,990,960	299,990,960
1 05 06	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	-	299,990,960	299,990,960
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1,587,672,782	2,257,902,900	3,845,575,682
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,587,672,782	2,257,902,900	3,845,575,682
1 07	PERHUBUNGAN	3,816,039,215	4,767,853,200	8,583,892,415
1 07 01	Dinas Perhubungan	3,816,039,215	4,767,853,200	8,583,892,415
1 08	LINGKUNGAN HIDUP	8,479,882,173	18,708,075,565	27,187,957,738
1 08 01	Dinas Lingkungan Hidup	8,479,882,173	18,708,075,565	27,187,957,738

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1 09	PERTANAHAN	-	-	-
1 09 02	Dinas Pertanahan	-	-	-
1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4,158,434,174	1,452,046,275	5,610,480,449
1 10 02	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil	4,158,434,174	1,452,046,275	5,610,480,449
1 12	KELUARGA BERENCANA	-	640,266,800	640,266,800
1 12 02	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil	-	640,266,800	640,266,800
1 13	SOSIAL	2,850,724,806	3,484,805,150	6,335,529,956
1 13 01	Dinas Sosial	2,850,724,806	3,484,805,150	6,335,529,956
1 14	TENAGA KERJA	2,514,558,937	1,334,245,250	3,848,804,187
1 14 02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,514,558,937	1,334,245,250	3,848,804,187
1 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2,063,684,643	2,013,924,650	4,077,609,293
1 15 02	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2,063,684,643	2,013,924,650	4,077,609,293
1 17	KEBUDAYAAN	1,204,924,867	2,221,574,600	3,426,499,467
1 17 03	Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	1,204,924,867	2,221,574,600	3,426,499,467
1 18	PEMUDA dan OLAHRAGA	672,353,857	366,292,500	1,038,646,357
1 18 02	Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olah Raga	672,353,857	366,292,500	1,038,646,357
1 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	4,033,167,054	4,967,929,600	9,001,096,654
1 19 04	Dinas Ketertiban	4,033,167,054	4,842,103,600	8,875,270,654
1 19 02	Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olah Raga	-	125,826,000	125,826,000
1 20	PEMERINTAHAN UMUM	139,349,481,256	86,167,168,560	225,516,649,816
1 20 01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5,354,216,925	-	5,354,216,925
1 20 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	595,881,854	-	595,881,854
1 20 03	Sekretariat Daerah	6,989,896,152	13,949,159,332	20,939,055,484
1 20 03A	Sekda dan Asisten	360,615,820	134,182,200	494,798,020
1 20 03B	Bagian Tata Pemerintahan	710,603,954	4,278,315,200	4,988,919,154

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1 20 03C	Bagian Pengendalian Pembangunan	750,848,847	943,833,450	1,694,682,297
1 20 03D	Bagian Hukum	686,421,806	1,384,130,750	2,070,552,556
1 20 03E	Bagian Organisasi	578,873,987	1,211,863,432	1,790,737,419
1 20 03F	Bagian Umum	1,925,890,870	1,948,058,700	3,873,949,570
1 20 03G	Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah	435,830,981	1,205,061,000	1,640,891,981
1 20 03H	Bagian Protokol	588,194,270	1,155,963,400	1,744,157,670
1 20 03I	Bagian Kerjasama	416,722,795	660,140,750	1,076,863,545
1 20 03J	Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	535,892,822	1,027,610,450	1,563,503,272
1 20 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2,024,200,823	11,404,997,450	13,429,198,273
1 20 05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	86,277,803,223	3,128,781,750	89,406,584,973
1 20 06	Badan Pengawasan Daerah	1,775,546,981	1,172,659,700	2,948,206,681
1 20 11	Kec.Tegalrejo	2,017,495,599	443,283,300	2,460,778,899
1 20 12	Kec.Jetis	1,634,034,294	364,766,615	1,998,800,909
1 20 13	Kec.Gondokusuman	2,590,887,505	455,802,750	3,046,690,255
1 20 14	Kec.Danurejan	1,607,200,399	451,910,575	2,059,110,974
1 20 15	Kec.Gedongtengen	1,341,431,910	303,032,300	1,644,464,210
1 20 16	Kec.Pakualaman	1,440,613,596	299,470,120	1,740,083,716
1 20 17	Kec.Ngampilan	1,228,305,777	273,538,675	1,501,844,452
1 20 18	Kec.Wirobrajan	1,903,546,181	343,009,100	2,246,555,281
1 20 19	Kec.Mantrijeron	1,965,079,227	336,032,000	2,301,111,227
1 20 20	Kec.Kraton	1,641,886,456	326,016,000	1,967,902,456
1 20 21	Kec.Gondomanan	1,333,512,583	296,341,000	1,629,853,583
1 20 22	Kec.Mergangsan	1,512,113,957	341,966,500	1,854,080,457
1 20 23	Kec.Umbulharjo	2,948,596,764	635,222,800	3,583,819,564
1 20 24	Kec.Kotagede	1,768,493,576	349,395,250	2,117,888,826
1 20 25	Badan Pengelolaan Barang Daerah	1,969,159,454	45,964,567,949	47,933,727,403
1 20 26	Kantor Pelayanan Pajak Daerah	6,353,622,509	3,983,351,900	10,336,974,409
1 20 27	Dinas Perijinan	2,476,322,437	1,203,452,250	3,679,774,687
1 20 28	Sekretariat KPU	599,633,074	140,411,244	740,044,318

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1 21	KEPEGAWAIAN	43,431,906,574	3,906,475,950	47,338,382,524
1 21 02	Badan Kepegawaian Daerah	43,431,906,574	3,906,475,950	47,338,382,524
1 24	KEARSIPAN	-	189,180,000	189,180,000
1 24 03	Badan Informasi Daerah	-	189,180,000	189,180,000
1 25	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,967,466,071	7,821,966,375	9,789,432,446
1 25 03	Badan Informasi Daerah	1,967,466,071	7,821,966,375	9,789,432,446
2	URUSAN PILIHAN			
2 01	PERTANIAN	3,070,381,615	5,320,039,585	8,390,421,200
2 01 05	Kantor Pertanian dan Kehewanan	3,070,381,615	5,320,039,585	8,390,421,200
2 04	PARIWISATA	-	3,291,078,000	3,291,078,000
2 04 03	Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	-	3,291,078,000	3,291,078,000
2 06	PERDAGANGAN	5,877,947,450	8,469,145,200	14,347,092,650
2 06 03	Dinas Pengelolaan Pasar	5,877,947,450	7,057,065,700	12,935,013,150
2 06 02	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	-	1,412,079,500	1,412,079,500
	JUMLAH TOTAL	458,383,216,785	271,301,366,275	729,684,583,060

VI. PENUTUP

Demikian nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008.

Yogyakarta, 29 Januari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd

HERRY ZUDIANTO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

ARIF NOOR HARTANTO
KETUA

ttd

ANDRIE SUBIANTORO
WAKIL KETUA

ttd

DWI BUDI UTOMO
WAKIL KETUA